



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SWASTIKO PURNOMO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG
3. NHK : 272579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **201.652.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 101.652.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **615.900.000**

1. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
269.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO MEDLEY 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
49.900.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VNT Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 297.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **75.475.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **21.165.601**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **2.000.000**

Sub Total **Rp.** **916.192.601**

III. HUTANG **Rp.** **29.702.287**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **886.490.314**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.